PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHIN 2015

(Skripsi)

Oleh :

ARI HERVINA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

ABSTRAK

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTABANDARLAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

Ari Hervina

Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung serentak pertama diikuti dengan pencalonannya sosok yang berpengaruh terhadap etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa menaruh harapan besar dengan keikutsertaan Hartato Loh Jaya dalam kompetisi politik lokal akan membawa dampak yang baik bagi kesejahteraan etnis Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan intensitas partisipasi etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampunt Tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif tentang perilaku dengan menggunakan analisis data kuantitatif dengan jumlah sampel 93 orang. Teknik pengambilan sampel dalam peneitian ini *Purposive Sampling.*

Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat etnis Tionghoa yang terbagi dalam 2 bentuk partisipasi politik yakni *pertama*, bentuk partisipasi konvensional memiliki nilai rata-rata 2,16 yang termasuk dalam kategori rendah dengan indikator yang lebih dominan adalah komunikasi individual dengan pejabat politik dalam urusan administratif. *Kedua*, bentuk partisipasi non-konvensional memiliki nilai rata-rata 1,36 yang termasuk dalam kategori sangat rendah, artinya di dalam bentuk partisipasi ini masyarakat etnis Tionghoa tidak

memiliki rasa ketertarikan untuk ikut serta/berpartisipasi dalam segala jenis bentuk partisipasi non-konvensional. Sedangkan intensitas partisipasi etnis Tionghoa memiliki nilai rata-rata 1,90 masuk dalam kategori rendah dengan indikator yang lebih dominan pada tingkat pengamat.

Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat Etnis Tionghoa, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

ABSTRACT

POLITICAL PARTISIPATION OF CHINESE ETHNIC IN SUB-DISTRICT OF EAST TELUK BETUNG IN THE MAJOR AND VICE MAJOR ELECTION OF BANDAR LAMPUNG IN 2015

By:

ARI HERVINA

This research was aimed to recognize how the shape and intensity of the political participation of Chinese ethnic in Sub-District of East Teluk Betung in the Major and Vice Major Election of Bandar Lampung in 2015.

Approaching method that has been used in this research is analytical-quantitative with descriptive approaching. The population is peop le in in Sub-District of East Teluk Betung amounted to 1,290 people with a sample of 93 people.

The results showed that the participation of ethnic Chinese who shared in the conventional form with an average score of 2.85 (low conventional participation category), and non-conventional with an average score of 3.85 (the category of non-conventional participation is very low). This shows the absence of political participation of ethnic Chinese in some aspects. Participation appear only on individual aspects of communication with political officials in administrative matters.

The intensity of the of Chinese ethnic in sub-district of East Teluk Betung Bandar Lampung, in the form of observational political phenomenon, generally categorized as high with the resulting average of 3.06. Based on the recapitulation of respondents to the political participation of ethnic Chinese in the election of Mayor and Vice Mayor of the majority respondents stated the candidate only imaging to gain power. In addition, participation in political affairs was considered will just be wasting their time. Not to mention the aspirations of the Chinese community who were not heard, as well as financial losses they

experienced in the former government, so that, in the end they do not want to be directly involved in the election of Mayor and Vice Mayor.

Keyword : Participation, ethnic Chinese, the election of Mayor and Vice Mayo

PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHIN 2015

Oleh :

ARI HERVINA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **PARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Nama Mahasiswa : *Ari Hervina*

No. Pokok Mahasiswa : **1216021013**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.** .....

   Penguji : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian : **22 September 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kerya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya pendapat yang saya tulis atau publikasi orang lain, keluaki secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ketidak benaran dalam pernytaan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Oktober 2016

Yang Pembuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
17D3CAEF130140275
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ari Hervina

NPM. 1216021013

RIWAYAT HIDUP

Ari Hervina, dilahirkan di Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 20 Mei 1994, merupakan putri dari Bapak Amuri, S.Pd dan Ibu Salmah Adi, S.Pd. peneliti merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yakni Tessya Febrania, Rohman A. dan Rohim A.

Jenjang akademis peneliti dimulai dengan menyelesaikan pendidikan TK Albayan pada tahun 2000, selanjutnya di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tri Tunggal Jaya dari tahun 2000 hingga 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tulang Bawang Udik dan lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tulang Bawang Udik dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2012 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2015 di pertengahan bulan Januari, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Agung Jaya, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 hari.

MOTTO

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Alloh

sesungguhnya Alloh menganpuni dosa-dosa semuanya

(Qs. Az-Zumar Ayat 53)

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolong, sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar

(Al-Baqoroh: 153)

Talenta tanpa kerja keras adalah tragedy

(Robert Half)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas rahmad dan ridho ALLAH SWT, yang senantiasa telah memberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, nikmat dan berkah-Nya di setiap hembusan nafas,
Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW

Ku persembahkan karya yang sederhana ini untuk…

Kedua orang tuaku, yang telah melahirkanku, yang selalu sabar dan mendoakan setulus hati setiap langkahku, memberinasiahat serta semangat di kala ku jatuh. Ibu adalah sumber kekuatan ku. Untuk ayah yang senantiasa memberi motifasi dalam setiat kehidupanku semasa kecil, aku berharap kau melihat tumbuh dan berharap membanggakanku.
Untuk Ayah dan Ibu maaf karena aku belum bias menanam ke bahagiaan di wajah kalian, maaf aku belum bias menanam bangga di hati kalian, terima kasi untuk semuanya kepada Ayah dan Ibu untuk cinta dan doa kepadaku.

Terimakasih untuk ketiga saudara dan saudari ku. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian kalian serta sudah memberikan motivasi kepadaku dan menjadi teladan bagiku.

Bapak/Ibu pembimbing dan penguji yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaraan yang tiada ternilai herganya, agar saya menjadi lebih baik, terimakasih bapak/ibu pembimbing dan penguji jasa kalian akan selalu terpatri dihati.

Sahabat-sahabat ilmu pemerintahan seperjuangan, serta

ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang selalu mengalir kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **"Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (SIP) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, saran, kritik, dan

masukannya selama ini terutama dalam proses penyusunan skripsi selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan bapak.

4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku Penguji Utama pada ujian skripsi. Terimakasih untuk masukan dan saran-sarannya mulai dari proses pembelajaran di kelas, seminar proposal, seminar hasil, hingga proses skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama proses perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan ke depannya.
6. Bapak Andri Marta, selaku dosen pembantu di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih banyak sudah memberikan judul-judul skripsi yang salah satunya dapat saya selesaikan seperti ini.
7. Pihak Dinas Kesbangpol Kota Bandar Lampung, Kantor Kecamatan Teluk Betung Timur dan Masyarakat Etnis Tionghoa yang telah bersedia menjadi responden saya dalam penelitian di lapangan untuk melengkapi data skripsi ini.
8. Teman seangkatan Rizki Pranata, Guntur Ardian Tamara dan Ananda Putri Sujatmiko, yang telah banyak membantu dan mengajarkan dalam proses penyusunan skripsi ini terutama dalam penyusunan proposal menuju ke seminar usul hasil dan kompr.
9. Teman-teman seperjuangan : Mutiara Sakinah, Ayu Oktaviani, Angela Chatlya S.IP, Yessy Yolanda Sarah Tarigan, Adelita Riantini S.IP, Oktanina Br Sembiring, Yulianita Riadtama, Rizki Pranata S.IP, Guntur Ardian Tamara, Budi Santoso, Evan Sarli Rakasiwi S.IP, Dedek Renaldo S.IP, Lintang Yunita

Afriana S.IP, Wahid Nur Rohman, Dwi Dian Kusuma, Dalilah, Ira Yuleni, Eri Rosalia, Nasira, Maya, Primadya Rosa Ayu Anggraeny, Khoirul Anwar, M Nur Abdilah yang sedang berjuang bersama-sama menyelesaikan proses skripsi ini semangat terus!

10. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2012 tanpa terkecuali.
11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuannya.
12. Untuk teman terdekat di kampus Angela Chatlya S.IP, Ayu Oktaviani dan Mutiara Sakinah. Terimakasih sudah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan terimakasih menjadi teman yang baik selama saya kuliah di ilmu pemerintahan.
13. Rizki Pranata, Guntur Ardian Tamara, Dedek Renaldo, Dwi Dian Kusuma, Budi Santoso, Wahid Nur, Lintang Yunita Afriani dan Primadya Rosa Ayu Angraeny. Terimakasih sudah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, selalu mendampingi kemanapun saya pergi, selalu membantu melengkapi semua proses dan persyaratan selama penyusunan skripsi ini dan terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama 2 tahun belakangan ini.
14. Teman-teman KKN Posdaya Agung Jaya yang saya sayangi, Tri Fajar Nugroho SH, Bainal Arif SE, Dwi Dian Kusuma, Ira Ervinda Naim S.Tp, Erna Wati S.An, Titian Widayanti S.Tp dan Kartika Putri. Terimakasih banyak sudah menjadi keluarga selama 40 hari di desa Agung Jaya, guna melengkapi syarat dari proses akademik ini. Banyak sekali pelajaran hidup yang saya dapat selama hidup dengan kalian.

15. Teman-teman SMA saya yang bernama Syarifudin, Rahmad Adi Putra, Syafei, Adi Indra Jaya, Hendra Saputra, Sueb Alinsyah, Alif Yolanda Putra, Andi Sanjaya, Hedi Saputra, Rosid Jauhari, Jusi Elita Sari, Novi Firda Sari, Septi Antika, Reni Faselia, Rahma, Sri Lestari, Julina Wati, Tri Wahyuni, Riana, Sulaimah, Feti Arinda, Anisa Oktaviani, Shinta Febri Rahmayani dan Sunhanty Jalil. Terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya dalam proses penyusunan skripsi ini terutama Syarif, Jusi dan Feti. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara bagi saya
16. Teman-teman semasa kecil sampai sekarang yang bernama Rahmad Adi Putra, Syafei, Adi Indra Jaya, Hedi Saputra, Rosid Jauhari, Anisa Oktaviani, Septi Antika, Julina Wati,. Terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus saudara bagi saya
17. Adik saya yang bernama Tessya Febrania, Rohman Ahmad dan Rohim Ahmad. Terimakasih atas doa dan dukungannya yang diberikan selama ini.
18. Terakhir dan takkan tergantikan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Amuri dan Ibu Salmah Adi, ada alasan tertentu yang membuat saya meletakkan nama orang-orang tercinta di urutan terakhir. Ribuan kata terimakasih dan jutaan materi rasanya tidak cukup untuk membalas budi kalian. Terimakasih setulus dan sebanyak-banyaknya, atas doa, ridho, restu, dukungan, dan semangatnya selama ini. Terimakasih telah menjadi orangtua yang luar biasa, telah mendidik saya dengan baik sehingga saya menjadi seperti ini. Terimakasih juga selama proses penyusunan skripsi ini kalian

sepenuhnya menyerahkan kepada saya tanpa ada target yang diberikan, dan pada akhirnya alhamdulilah skripsi ini terselesaikan.

Dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, 10 Oktober 2016
Penulis

Ari Hervina

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**
Daftar Tabel…… ..... **iv**
Daftar Gambar …. ..... **v**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Partisipasi Politik 11
1. Bentuk-bentu Partisipasi Politik..... 17
2. Intensitas Partisipasi Politik..... 29
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.... 33
B. Tinjauan Tentang Etnis 34
1. Pengertian Etnis 34
2. Identitas Etnis dan Realitas Etnis..... 40
C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum 41
1. Pengertian pemilihan umum..... 41
2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 42
3. Asas Pemilihan Umum..... 45
4. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah..... 46
D. Kerangka Pikir 48

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 51
B. Lokasi Penelitian 53
C. Definisi Konseptual 54
D. Definisi Oprasional 55
E. Populasi dan Sampel..... 59
1. Populasi..... 59
2. Sampel 60

F. Teknik Pengambilan Sampel 61
G. Jenis Data 63
1. Data Primer 63
2. Data Sekunder 63
H. Teknik Pengumpulan Data 64
1. Angket atau Kuesioner 64
2. Wawancara 64
3. Dokumentasi 65
I. Skala Pengukuran 66
J. Teknik Pengelolaan Data 67
1. Editing 67
2. Pengkodean 67
3. Tabulasi (Proses Pembeberan) 68
4. Interprestasi Data 68
K. Teknik Analisi Data 69
L. Uji Validitas dan Reliabilitas 70
1. Uji Validitas Data 70
2. Uji Reliabilitas Data 71

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur 73
1. Keadaan 73
2. Letak Geografi dan Luas Kecamatan 74
3. Topografi 75
4. Jumlah Penduduk Etnis Tionghoa 75
5. Persentasi Tingkat Partisipasi 76
B. Sejarah Sosial dan Politik Komunitas Etnis Tionghoa 77
1. Masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung dan Identitais Ketionghoaan 77

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden 86
B. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 89
1. Uji Validitas Intrumen 89
2. Uji Reliabilitas Intrumen 90
3. Deskripsi Data 91
1. Deksripsi Variabel Bentuk Partisipasi Politik 92
a. Bentuk Partisipasi Politik Konvensional 93
b. Bentuk Partisipasi Politik Non-Konvensional .. 110
2. Deskripsi Variabel Intensitas Partisipasi Politik .. 116
C. Analisis Bentuk Partisipasi Partisipasi Politik dan Intensitas Partisipasi Politik 122
1. Bentuk Partisipasi Politik 122
a. Partisipasi Politik Konvensional 122
b. Partisipasi Politik Non Konvensional 125
c. Intensitas Partisipasi Politik 126

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 128
B. Saran 130

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. **Bentuk Partisipasi Politik** 20
2. **Penghitungan Jumlah Sampel Per Kelurahan** 62
3. **Validitas Variabel Bentuk-bentuk Partisipasi** 7l
4. **Reliabilitas Intrimen Penelitian** 72
5. **Distribusi Responden Menurut Umum** 86
6. **Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin** 87
7. **Distribusi Responden Menurut Pekerjaan** 88
8. **Validitas Variabel Bentuk-bentuk Partisipasi** 89
9. **Reabilitas Intrimen Penelitian** 90
10. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Pemberian Suara** 94
11. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Diskusi Politik** 96
12. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Kegiatan Kampanye** 98
13. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Kegiatan Kampanye** 100
14. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan** 102
15. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan** 104
16. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Komunikasi individual dengan Pejabat Politik dan Administratif** 106
17. **Betuk Partisipasi Konvensional pada Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik dan Administratif** 108
18. **Betuk Partisipasi Non-Konvensional pada kategori Mogok** 111
19. **Intensitas Partisipasi pada Kategori Aktifis** 114
20. **Intensitas Partisipasi pada Kategori Partisipan** 116
21. **Intensitas Partisipasi pada Kategori Pengamat** 118
22. **Intensitas Partisipasi pada Kategori Apolitis** 120
23. **Rekapitulasi Jawaban Responden Partisipasi Politik bentuk Konvensional** 123
24. **Rekapitulasi Jawaban Responden Partisipasi Politik Bentuk Non-Konvensional** 125
25. **Rekapitulasi Jawaban Deksripsi Variabel Intensitas Partisipasi Politik** 127

DAFTAR GAMBAR

Tabel .Halaman

1. **Piramida Intensitas Partisipasi Politik** 27
2. **Kerangka Pikir Penelitian**..... 50
3. **Distribusi Responden Menurut Umur** 97
4. **Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin** 98
5. **Distribusi Responden Menurut Status Pekerjaan** 99

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan demokrasi dalam prateknya selalu berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah (Tricahyo, 2006: 6). Pemilu yang digunakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1. Pada Pemilu, para pemilih juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.

Pada proses pelaksanaan Pemilu di Indonesia memberikan kebebasan kepada seluruh warga negaranya untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 1ayat (1) disebutkan bahwa:

> "Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

Pada proses Pemilu membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat. Partisipasi merupakan aspek penting dalam Pemilu, karena melalui partisipasi masyarakat dapat ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang di lakukan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1977: 3). Partisipasi warga negara yang legal bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil mereka (Norman H. Nie dan Sidney Verba, 1975: 1).

Adapun pemikiran yang mendasar dari konsep partisipasi politik adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Subakti, 1999: 140).

Dengan demikian untuk mewujudkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum tersebut harus ada kesadaran berpartisapasi masyarakat yang tumbuh di dalam demokrasi. Dimana negara Indonesia yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warga negara dalam keikutsertaan mempengaruhi pengambilan keputusan, mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu di negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka pertisipasi politik warganya cenderung meningkat.

Berkenaan dengan partisipasi politik yang baik, salah satu perwujudannya adalah keterlibatannya masyarakat secara menyeluruh dalam Pemilihan Kepala Daerah. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih calon kepala daerah. Pemilu tersebut dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 desember 2015. Pemilihan Kepala Daerah serentak dilaksanakan bagi kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sampai periode 2015. Dari data kementrian dalam negeri di ketahui bahwa terdapat 541 daerah otonom di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Jumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 adalah sebanyak 204 daerah, kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2016 sebanyak 100 daerah. Kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 ada sebanyak 214, sehingga daerah tersebuat harus menyelenggrakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Lampung.

(http://www.antarnews.co/berita/tujuh-gelombang-Pemilihan_Kepala_Daerah-serentak-2015-hingga-2027, diakses pada 23 april 2015, pukul 20.01 WIB)

Dari data tersebut ada 8 Kabupaten atau Kota yang masa jabatanya habis pada tahun 2015 dan harus melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah kembali seperti daerah-daerah ini yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Way Kanan. (http://www.antarnews.co/berita/tujuh-gelombang-Pemilihan_Kepala_Daerah-serentak-2015-hingga-2027, diakses pada 23 april 2015, pukul 20.01 WIB)

Bandar Lampung merupakan IbuKota Provinsi Lampung yang memiliki masyarakat dengan keanekaragaman suku, bangsa, etnis, dan agama. Salah satunya yakni etnis Tionghoa yang memiliki populasi sekitar 26 % dari total jumlah masyarakat Kota Bandara Lampung sebesar 1,169,101 jiwa. Seperti pada saat pemilihan tahun 2015 Pada pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung, keterlibatan etnis minoritas dalam kancah perpolitikan di Kota Bandar Lampung mulai muncul. Hal tersebut ditandai dengan kemunculan nama Hartarto Loh Jaya pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015. Fenomena tersebut turut mendukung keterlibatan masyarakat etnis Tionghoa dalam aktivitas politik kepartaian yang semakin berkembang. (Lampung Post, edisi 9 April 2013)

Meskipun begitu, pencalonan Hartarto dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016 gagal. Berdasarkan hasil wawancara (pada Desember 2015) dengan anggota DPC Partai Demokrat untuk Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa kegagalan Hartarto disebabkan karena kurang *cost* politik, selain itu partai menginginkan agar Hartarto tetap bertahan di DPRD Provinsi Lampung untuk membantu kepemimpinan gubernur dan mengamankan suara Partai Demokrat di Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan Yusuf Kohar memang Hartarto memiliki popularitas yang lebih tinggi. Namun Yusuf Kohar merupakan kader militant Partai Demokrat. Sehingga, partai lebih mengajukan Yusuf Kohar sebagai calon wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

Kegagalan Hartarto dalam pencalonan kepala daerah menyebabkan kurangnya partisipasi politik dan eksistensi etnis Tionghoa di Kota Bandar Lampung dalam dalam dunia politik. Berdasarkan data menyatakan bahwa hasil presentasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Timur yakni sebanyak 65% dari hasil perolehan suara sah dan tidak sah sekitar 20.592 dengan Data Pemilih Tetap (DPT) 23.466 jiwa. Sementara itu jumlah etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur ada 1290 jiwa. (*sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)*

Secara lebih rinci, Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki 6 Kelurahan yakni Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Kota Karang Raya, Kelurahan Perwata, Kelurahan Keteguhan, Kelurahan Suka Maju, dan Kelurahan Way Tataan. Berdasarkan jumlah 6 Kelurahan tersebut terdapat 4 Kelurahan dengan dominasi populasi masyarakat etnis Tionghoa terbesar, yakni di Kelurahan Perwata 550 jiwa, Kelurahan Kota Karang sekitar 300 jiwa, Kelurahan Keteguhan 160 jiwa, dan Kelurahan Kota Karang Raya 140 jiwa. Adapun partisipasi politik pada kelurahan tersebut yakni di Kelurahan Perwata 65%, Kota Karang sekitar 63%, Keteguhan 60%, dan Kota Karang Raya 62%.

Berdasarkan hasil pra-riset, wawancara dengan masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur pada tanggal 8 januari 2016. Penulis menemukan fakta bahwa masyarakat etnis Tionghoa menyatakan bahwa etnis Tionghoa tidak antusias dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Etnis Tionghoa mengganggap bahwa Pemilihan Umum tidak berdampak apapun terhadap kehidupan mereka. Hal ini karena masyarakat etnis Tionghoa memiliki kekecewaan terhadap pemerintahan sebelumnya yang menaikan Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) hingga 300 %, berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) riil, walaupun hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini lah yang menjadi salah satu kekecewaan etnis Tionghoa karena itu mempengaruhi ekonomi mereka terutama mereka yang memiliki toko-toko, gudang-gudang penyimpanan, dan mereka yang bergerak dibidang

perdagangan. (Lampung Post, berita pemkot Bandar Lampung Niak tarif PBB hingga 300%, edisi 9 mei 2015)

Melalui kebijakan menaikan pajak tersebut, maka membuat mereka merasa keberatan terhadap biaya Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB). Hal tersebut secara tidak langsung, membuat masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur tidak memilih ketertarikan pada dunia politik dan tidak ingin ikut dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Artinya, fenomena ini menambah jumlah jumlah angka golput bagi etnis tertentu. Pemerintah yang berjalan, dalam konteks ini tidak bias memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk terus terlibat aktif dalam praktik politik.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan riset mengenai Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 2015. Berikut Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Meneliti tentang Partisipasi Politik Etnis.

Berkenaa dengan penelitian ini maka peneliti menemukan sejumlah penelitiana terdahul yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti ini. Berikut penelitian terdahulu yang telah penulisan sajikan dan bentuk narasi:

1. Nur Ailiyawati mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2002 FISIP Unila. Dengan judul " Partisipasi Politik etnis Tionghoa dalam Pemilihan Presiden Putaran 1 di Kota Bandar Lampung" Riset yang dilakukan terlebih dahulu mengenai partisipasi politik etnis Tionghoa dan peneliti terdahulu melihat partisipasi etnis Tionghoia dari bentuk partisipasi yang ada di Kota Bandar Lampung.
2. Gamellia Oktavia S Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2009 FISIP Universitas Riau "Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pekan Baru Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013 (studi Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tapan)" dimana riset yang dilakukan adalah tingkat partisipasi dan faktor-faktor yang memepengaruhi partisiapsi politik.

Namun, Jika kedua peneliti hanya melihat dari bentuk partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Sedangkan riset penelitian yang akan lakuakan melihat dari bentuk partisipasi politiknya dan peneliti menambahkan partisipasi dilihat dari intensitas suatu partisipasi etnis Tionghoa dalam suatu pemilihan umum. Dimana riset sebelumnya melihat dari keseluruhan di Kota Bandar Lampung namun riset peneliti ini lebih mengerucut di Kecamatan Teluk Batung Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015?
2. Bagaimanakah intensitas Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015
2. Untuk mengetahui intensitas Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kajian politik, khususnya yang berkaitan dengan teori/pendekatan partisipasi politik etnis Tionghoa dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia khususnya di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

   Manfaat hasil penelitian ini memberikan gambaran dan penjelas mengenai penyebab kurangnya partisipasi politik masyarakat etnis tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan input terhadap implementasi Pemilu oleh *stakeholders* Pemilu yaitu KPU Kota Bandar Lampung serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan manajemen Pemilu di Kota Bandar Lampung, serta partai politik dan kandidat yang akan maju pada pemilihan mendatang agar dapat mencari solusi terkait kurangnya partisipasi politik etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur sehinga jumlahnya dapat berkurang /pada pemilihan mendatang

II. TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Partisipasi Politik

Hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik di abad ke 14 telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang. Kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa *renaisance* dan reformasi abad ke 15 sampai abad 17 dan abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang profesional, buruh kotor, wiraswasta industri, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai negara.

Secara etimologi partisipsi berasal dari bahasa latin, yaitu *Pars* berarti bagian dan *capere* yang berarti mengambil maka bila digabungkan maka dapat kita artikan “mengambil”. Dalam bahasa inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil bagiana atau mengambil peran. Jadi partisipasi politik dapat kita artikan dengan mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu Negara (Soehamo,2004: 102).

Menurut Mac Andrew seperti dikutip oleh Mas'oed (2001: 40-50), ada kemungkinan dalam menganalisa partisipasi politik dari segi organisasi kolektif yang berlainan untuk digunakan dalam menyelenggarakan partisipasi dan biasanya yang menjadi landasan yang lazim adalah :

a. Kelas yang menyangkut perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang sama,
b. Kelompok merupakan perorangan yang meliputi ras, agama, bahasa, atau etnisitas yang sama,
c. Golongan, dengan perorangan yang akan dipersatukan oleh interaksi yang akan terus menerus atau intens dan salah satu manivestasinya adalah pengelompokan patron-klien. Pembentukan pemerintah yang didasarkan pada partai politik seringkali menciptakan harapan yang tersebar luas.

Sedangkan partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara umum masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Modernisasi telah menghasilkan partisipasi politik yang meluas. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi politik yang meluas adalah ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* (1994: 4) yaitu:

> "Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. *(By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take)"*

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak

mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist professional* yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Dalam perspektif lain McClosky dalam International *Encyclopedia of the Sosial Science* dalam Mariam Budiharjo (1998: 2) menyatakan bahwa :

> *"The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy* (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum"

Berdasarkan perspektif menurut Mariam Budiardjo (2008: 123) memaknai partisipasi politik adalah:

> "Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya"

Berbagai definisi partisipasi politik yang telah diemukakan di atas, secara eksplisit mereka memaknai partisipasi politik bersubstansi *core political activity* yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penetapan kebijakan publik.

Selanjutnya secara eksplisit, Huntington dan Nelson (1994: 16) dikutip dari Drs. Sudijono Sastroatmodjo dalam buku Perilaku Politik membedakan partisipasi politik kedalam dua karakter, yaitu:

a. Partisipasi yang demokratis dan otonom adalah bentuk partisipasi politik yang sukarela,
b. Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang dimobilisasikan.

Kemudian Menurut Ramlan Surbakti (1999: 141) juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik di atas yakni:

> "Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan" Partisipasi politik tersebut didefenisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa"

Berangkat dari dua gagasan menganai partisipasi politik tersebut di atas maka, dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dibedakan dalam dua hal ini sebagai berikut:

1. Partisipasi warga masyarakat dalam keadaan sadar dalam hal untuk memperjuangkan hak otonom masyarakat yang tanpa didorong oleh kekuataan di luar diri individu atau partisipasi politik tidak berdasarkan mobilisasi yang dilakoni baik oleh aktor maupun pemerintah.
2. Partisipasi politik yang dimobilisasi atau digerakan oleh aktor-aktor politik.

Berdasarkan bukunya Mas'oed dan Mac Andrews tahun 1981, dengan judul perbandingan sistem politik. Putnam membuat suatu model skematis startifikasi sosial politik. Model tersebut dibangun berdasarkan data dari beberapa negara tentang proporsi warga negara yang terlibat dalam berbagai tingkat kegiatan politik. Sedangkan menurut Prof. Damsar (2010: 10) pada puncak piramida terletak pada kelompok pembuat keputusannya itu individu-individu yang secara langsung terlibat di dalam pembuatan kebijaksanaan nasional.

Argumentasi tersebut bisa dimasuki pada dua level pernyataan mendasar, di antaranya keterlibatan warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan publik serta keterlibatan warga masyarakat dalam memilih pemimpin baik di daerah maupun nasional. Secara teoritis dapat dipahami bahwa posisi puncak dari bangunan piramida yang mempunyai pengaruh sentral dalam segala hal, termasuk pada level partisipasi politik. Seperti yang kita temui pada pembuatan keputusan dan kebijakan pemerintah, posisi ini diperankan dan dieksekusi oleh orang-orang yang menduduki posisi puncak yang secara formal telah dimandat atau didaulat oleh rakyat pada saat Pemilu.

Disisi lain, posisi aktor-aktor puncak tersebut dapat dengan leluasa dalam menggerakan atau memobilisasi dukungan politik masyarakat pada setiap perhelatan politik. Atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga masyarakat dalam proses politik baik dalam keadaan sadar maupun bersifat semu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan umum maupun keterlibatannya dalam mendukung dan memilih para pemimpinnya.

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik seseorang tanpak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007: 148), bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara *(voting)* entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara.

Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012: 100) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

a. Menduduki jabatan politik atau administrasi,
b. Mencari jabatan politik atau administrasi,
c. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik,
e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik,
f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik,
g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb,
h. Partisipasi dalam diskusi politik internal,
i. Partisipasi dalam pemungutan suara.

Menurut Maribath dan Goel dalam Rahman (2007: 289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori :

a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik,
b. Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam Pemilu,
c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat,
d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional.

Menurut Ramlan Subakti (1999: 142) partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasan politik dan kepuasan atau ketidak puasan warga negara (Sujonostroatmojo,1998: 74).

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik yang dikutip oleh Mas'oed dan Mac Andrew (1981: 44), Almon membedakan bentuk partisipasi menjadi dua yaitu:

a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi moderen,
b. Partisipasi politik non-konvensional yaitu suatu bentuk partispasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam Anthonius (2012: 70) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional. Rincian bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

Tabel 1: Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik harta benda(pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) 7. Perang grilya dan revolusi

Sumber: *Almond dalam Anthonius (2012: 101)*

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Abramson dan Hardwick membedakan partisipasi politik menjadi dua jenis, yaitu konvensional dan tidak konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional dalam pemilihan umum misalnya adalah memberikan suara dalam Pemilu, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, melakukan lobi-lobi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, serta menjadi kandidat.

Bentuk partisipasi politik yang paling lazim terjadi di negara-negara demokratis yaitu memberikan suara dalam pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam hal ini, memberikan suara dalam pemilihan umum berarti menyatakan dukungan terhadap partai atau kandidat tertentu dan menolak partai atau kandidat lain yang sedang berkompetisi. Ketika pilihan atau suara yang diberikan pada pemilihan sekarang berubah dari pilihan pada pemilihan sebelumnya, berarti pemilih memberikan dukungan terhadap sistem yang sedang berlangsung, serta menginginkan perubahaan secara demokratis dan elegan.

Bentuk partisipasi politik konvensional lain yang lebih aktif antara lain adalah ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, bergabung dalam tim sukses, dan menyumbang dana, karena bentuk partisipasi politik ini berperan lebih aktif dalam memperjuangkan keinginan atau tuntutan. Bentuk yang paling aktif adalah ikut berkompetisi dengan menjadi kandidat, karena keikutsertaannya dalam proses politik nyaris sempurna karena kandidat harus mengeluarkan dana untuk pencalonan dan kampanye, harus terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan kampanye untuk mempengaruhi orang lain agar memberikan dukungan, melakukan lobi-lobi untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu, termasuk melobi penyandang dana serta kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi tertentu.

Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada konteks pemilihan. Ada beberapa bentuk partisipasi politik konvensional lain yang sering dijumpai, antara lain: aktif mencari informasi mengenai berbagai persoalan politik, menulis surat pembaca yang berisi penilaian-penilaian atau saran-saran mengenai berbagai persoalan politik untuk dipublikasikan di surat kabar atau majalah, mendatangi pejabat lokal untuk menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan dan menulis petisi untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan.

Dalam arti non-konvensional, partisipasi politik mencakup berbagai kegiatan yang cenderung melibatkan banyak orang dalam suatu bentuk kelompok massa dan kadang disertai dengan pelanggaran tertip hukum dan kekerasan. Partisipasi politik non-konvensional dapat diterima secara luas apabila tidak disertai aksi pengrusakan atau kekerasan, seperti misalnya aksi protes dengan cara berpawai seraya membawa spanduk dan poster yang berisi tentang berbagai tuntutan, mengkoordinasikan aksi pemogokan di kalangan buruh atau menuntut kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja, dan peningkatan jamisan sosial.

Mengenai partisipasi politik, Hardwick mengatakan sebagai berikut:

> "*the manner in which citizens interact with government. Trough active participation in government, citizens attemp to convey their needs to public officials in the hope of having these needs met"* (cara-cara dengan mana warga negara berinteraksi dengan pemerintah. Melalui partisipasi secara aktif dalam pemerintah warga negara berupaya untuk membawa

> kepentingan kepentingannya ke pejabat-pejabat publik agar kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi)"

Berbagai pengamatan menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi partisipasi politik konvensional, setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa seseorang ikut mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Ketiga alasan tersebut merupakan sebagai berikut:

a. Untuk mengkomunikasikan tuntutan atau aspirasi,
b. Untuk lebih memantapkan upaya pencapaian tujuan dari sistem politik yang ada,
c. Untuk menunjukkan dukungan terhadap sistem politik beserta para pemimpin atau elit politik yang ada.

Ketiga alasan tersebut saling berkaitan sama lain, Seseorang kadang merasa tidak puas dengan kinerja partai atau kandidat tertentu, maka kemudian memberikan suara kepada partai atau kandidat lain dalam pemilihan. Hal tersebut berarti bahwa orang yang bersangkutan mengkomunikasikan aspirasi atau keinginan sekaligus juga memantapkan pencapaian tujuan sistem karena sistem politik pada umumnya dikembangkan antara lain untuk terselenggaranya proses-proses politik dengan mekanisme yang adil dan wajar. Pada saat yang sama hal demikian juga menunjukkan dukungan orang bersangkutan terhadap elit politik tertentu dengan memberikan suara kepadanya.

Adapun pengertian partisipasi politik menurut David P. Roth dan Wilson dalam bukunya "*The Comparative Study Of Politics"* membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi yang menunjukan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Adapun pola partisipasi dalam bentuk piramida dibedakan menjadi dua.

Partisipasi di negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataannya dengan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain, dengan kata lain tidak semua warga negara ikut dalam proses politik.

Sedangkan menururt Samuel Huntington dan Joan Nelson (1994: 6) yang dikutip dari Drs. Sudijono Sastroatmodjo dalam buku Perilaku Politik, partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klarifikasi yang berbeda-beda yaitu:

a. Kegiatan pemilihan mencakup suara akan tetapi juga sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, dengan mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan,

b. *Lobbying* merupakan dengan mencakup upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan tentang persoalan yang telah menyangkut sejumlah besar.
c. Kegiatan organisasi merupakan menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannnya yang utama dan eksplisit adalah dengan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah orang,
d. Mencari koneksi merupakan tindakan perorangan yang akan ditujukan terhadap pejabat pemerintah dan dengan memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang,
e. Tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai bentuk kategori tersendiri dengan sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang ataupun harta benda.

Oleh sebab itu ada kemungkinan dalam menganalisa partisipasi politik dari segi organisasi kolektif yang berlainan untuk digunakan dalam menyelenggarakan partisipasi dan biasanya yang menjadi landasan yang lazim adalah :

a. Kelas, yang menyangkut perorangan dengan status sosial, pendapatan pekerjaan yang sama,
b. Kelompok, merupakan perorangan yang meliputi ras, agama, bahasa, atau etnisitas yang sama,
c. Golongan, dengan perorangan yang akan dipersatukan oleh interaksi yang akan terus menerus atau intens dan salah satu manivestasinya adalah pengelompokan patron- klien.

Sebagaimana telah dikemukakan, kegiatan aksi protes atau demonstrasi sampai tingkat tertentu dapat diterima secara luas sebagai bentuk partisipasi politik dalam masyarakat demokratis. Di Indonesia, aksi protes atau demonstrasi seringkali disertai dengan kekerasan dan pengrusakan yang justru tidak sesuai dengan hakekat demokrasi. Orang-orang yang memberikan suara dan berdemonstrasi tanpaknya merupakan bentuk nyata partisipasi politik, tetapi seringkali tindakan mereka tidak didasarkan atas motivasi atau niat pribadi pelaku-pelakunya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Banyaknya personal yang berdemonstrasi ataupun membanjiri tempat pemungutan suara tersebut digerakkan oleh majikan mereka, yang apabila tidak menuruti akan mengancam pekerjaan yang berpengaruh pada masa depan mereka. Karena itu mereka tidak sadar bahwa tindakan yang dilakukan itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kontribusi partisipasi politik tidak dapat disamaratakan dalam semua sistem politik. Sistem politik yang satu lebih menekankan arti pentingnya partisipasi politik dari yang lain dalam sebuah sistem politik yang berbeda, meskipun perbedaannya tidaklah selalu formal. Dalam masyarakat yang primitif yang politiknya cenderung terintegrasi dengan kegiatan masyarakat, umumnya partisipasinya cenderung tinggi bahkan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan lain. Di pihak lain, dalam masyarakat yang saling berhubungan karena adanya komunikasi dan institusi, pengaruh moderen, dan tradisional, partisipasinya mungkin telah dibatasi oleh faktor-faktor seperti milik huruf, dan masalah-masalah umum komunikasi.

Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintah. Di pihak lain partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan mentati peraturan, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sedangkan partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja. Jika partisipasi politik hanya dianggap sebagai variabel yang homogen dan sederhana, maka pola-pola partisipasi politik tidak dapat dipahami sebab-sebab dan konsekuensinya. Hal itu disadari bahwa dalam bentuk dan pola-pola partisipasi politik terdapat banyak hal yang mempengaruhi timbulnya dorongan ke arah partisipasi politik masyarakat.

Sulit untuk disimpulkan bahwa masyarakat tertentu memiliki partisipasi yang tinggi atau rendah, sebab tiap-tiap bentuk partisipasi itu memiliki latar belakang sebab dan konsekuensi-konsekuensi, serta arah pengembangan yang berbeda-beda. Barang kali dalam kerangka umum saja dapat ditarik pola umum bahwa seseorang memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dari orang lain. Hal itu berdasarkan aktivitas dan perilaku yang tanpak yang dilakukan oleh orang tersebut.

Dengan demikian persoalan partisipasi tidak saja persoalan tinggi rendahnya partisipasi, tetapi juga menyangkut variabel-variabel lain yang mempengaruhi seperti latar belakang munculnya partisipasi ke arah pembangunan, konsekuensi-konsekuensi, dan pola partisipasi itu sendiri.

2. Intensitas Partisipasi Politik

Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi politik menurut frekuensi dan intensitasnya. Rush dan Althof (2005: 142), menyatakan bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktivitas politik merupakan minoritas (seringkali berupa minoritas yang sangat kecil) dari anggota suatu masyarakat.

Budiardjo (2008: 371), mengemukakan pendapatnya mengenai intensitas partisipasi politik di negara demokrasi sebagai berikut:

> "Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politk ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan"

Ada yang menyamakan dua jenis gejala ini dengan piramida yang basisnya lebar, tetapi menyempit ke atas sejalan dengan meningkatnya intensitas politik. Di antara basis dan puncak terdapat kegiatan yang berbeda-beda intensitasnya. Berbeda menurut intensitas kegiatan maupun mengenai bobot komitmen orang yang bersangkutan.

Roth dan Wilson dalam Suryadi (2007: 137), menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitas kegiatannya menjadi aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Apabila dijenjangkan, intensitas kegiatan partisipasi politik warga negara tersebut membentuk segitiga yang menyerupai piramida yang kemudian dikenal dengan istilah "piramida partisipasi politik". Piramida partisipasi politik dapat diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga negara dalam kegiatan pemilihan umum, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Kepala Desa.

Piramida Partisipasi Politik

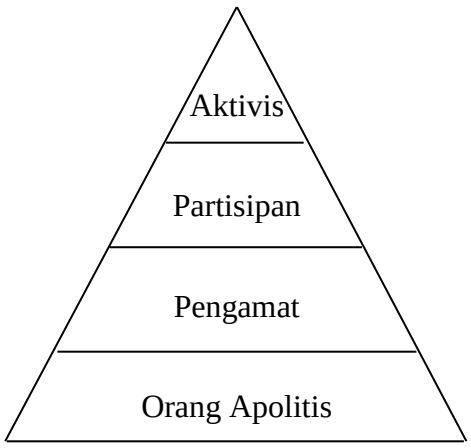

Gambar 1

a. Aktivis

Pada dasarnya tingkat partisipasi politik pada tingkat kategori aktivis seperti para pejabat politik serta pimpinan partai politik atau kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas

tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

Terutama bagi pejabat politik, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. Pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi politik ditingkat kategori aktivis, jumlahnya sangat terbatas, hanya diperuntukan bagi sejumlah kecil orang (terutama elit politik) yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan.

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik di tingkat kategori aktivis, bukan saja ditempuh dengan cara-cara yang formal dan prosedural atau mengikuti peraturan yang ditetapkan. Hal ini di karenakan juga terdapat warga negara yang berupaya mempengaruhi proses politik dengan cara-cara yang non-formal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindak kekerasan.

b. Partisipan

Partisipan pada tingkat kategori partisipan adalah seperti menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, kelompok kepentingan, serta aktif dalam proyek-proyek sosial. Pada tingkat kategori partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, maka semakin tinggi intensitasnya dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin kecil intensitasnya dan semakin besar luas cakupannya.

c. Pengamat

Partisipasi politik pada tingkat kategori pengamat seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara dalam Pemilu, menjadi anggota partai politik atau kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, dan mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara. Artinya lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama jika dikaitkan dengan arti pentingnya dalam sistem politik. Praktek-praktek tersebut memiliki tingkat efektifitas yang rendah dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, selain itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.

d. Apolitis

Apolitis adalah kelompok warga negara yang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan kegiatan politik. Mereka yang termasuk dalam kategori ini cenderung tidak perduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. Melihat piramida partisipasi politik di atas penulis sedikit menyimpulkan bahwa semakin tinggi derajat dan aktivitas politik seseorang maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Pada penelitian ini piramida partisipasi politik diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga negara dalam kegiatan pemilihan umum kepala daerah. Dimana kategori intensitas partisipasi politik warga negara dapat ditentukan berdasarkan aktivitas-aktivitas politik mereka pada tiap tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tersebut.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (2006: 144) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

a. Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat tempat dia hidup,

b. Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

a. Tahapan Persiapan,
b. Tahapan Pelaksanaan,
c. Tahapan Penyelesaian

B. Tinjauan tentang Etnis

1. Pengertian Etnis

Menurut Em Zul Fajri dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa etnis berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ariyuno Sunoyo dalam Kamus Antropologi (1985: 150), bahwa etnis adalah suatu kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun rapi dan dapat digambarkan ke dalam suatu peta etnografi.

Setiap kelompok memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memisahkan antara satu kelompok etnis dengan etnis lainnya. Menurut Koentjaraningrat (1982: 58), konsep yang tercakup dalam istilah etnis adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.

Menurut Arifin bahwa ada 3 definisi kelompok etnik, diantaranya:

a. Suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai suatu sub kelompok dalam suatu masyarakat yang luas,
b. Suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama,
c. Etnik merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu, yang kita sebut dengan *ethnic* domain.

   (Muhammadarifin7.blogspot.co.id/2013_02_01_archive.html?m=1)

Menurut Payung Bagun (1998: 68), Suku bangsa yang sering disebut etnik atau golongan etnik mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut terdiri dari:

a. Memiliki wilayah sendiri,
b. Mempunyai struktur politik sendiri berupa tata pemerintahan dan pengaturan kekuasaan yang ada,
c. Adanya bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi dalam interaksi,
d. Mempunyai seni sendiri (seni tari lengkap dengan alat-alatnya, cerita rakyat, seni ragam hias dengan pola khas tersendiri),
e. Seni dan teknologi arsitektur serta penataan pemukiman,
f. Sistem filsafat sendiri yang menjadi landasan pandangan, sikap dan tindakan,
g. Mempunyai sistem religi (kepercayaan, agama) sendiri.

Etnisitas secara substansial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya tetapi keberadaannya terjadi secara bertahap. Pengertian etnisitas berasal dari etnis bahasa Yunani kuno, yang pada dasar pengertiannya adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama.

Handelman membedakan tiga tingkat perkembangan yang dipertunjukkan di dalam komunitas budaya manusia, yakni:

1. Kategori etnis, keterhubungan seseorang dengan masyarakat merupakan suatu ikatan yang agak longgar dan sekadar suatu gambaran adanya perbedaan budaya antara kelompoknya dengan dunia luar. Contoh kelompok etnis yang ikatannya telah longgar namun tetap masih menjaga ikatan etnisnya adalah daerah Tapanuli, Aceh dan Sulawesi Selatan,
2. Jaringan etnis sudah terdapat interaksi yang teratur antara anggota-anggota etnis tersebut sehingga dengan jaringan tersebut terjadi distribusi sumber-sumber antara anggotanya. Pada tingkat asosiasi etnis, para anggotanya telah mengembangkan minat yang sama dan membentuk organisasi-organisasi politik dalam pernyataan-pernyataan kolektif, contohnya Persaudaraan Saudagar Bugis-Makassar yang sudah mempunyai agenda kegiatan rutin,
3. Pada tingkat Masyarakat Etnis (*ethnic community*) kelompok masyarakat tersebut telah memiliki teritori yang tetap serta terikat di atas organisasi politiknya seperti misalnya yang terlihat di dalam suatu negara nasional (*nation state*).

Schermerhorn melengkapinya dengan mengatakan bahwa suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya di dalam

satu atau beberapa elemen-elemen simbolik yang menyatakan akan keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, analisisi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut yang pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok.

Etnisitas adalah sebuah proses kesadaran yang kemudian membedakan kelompok kita dengan mereka. Basis sebuah etnisitas adalah berupa aspek kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, seperti misalnya adanya kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, ada kesamaan struktural sosial, bahasa, upacara adat, akar keturunan, dan sebagainya. Berbagai ciri kesamaan tersebut, dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan dan dianggap biasa. Dalam kaitannya, etnisitas menjadi persyaratan utama bagi munculnya strategi politik dalam membedakan “kita” dengan “mereka” Ivan A hadar, 2000.

Dari beberapa macam argumentasi menganai etnis tersebut di atas, dapat ditarik benang merah bahwa yang mana etnis adalah sebuah komunitas masyarakat yang memiliki berbagai macam kesamaan dalam kehidupan sosial-kulturalnya, kesamaan tersebut yang membedakan mereka dengan komunitas-komunitas lainnya dalam masyarakat. Olehnya itu yang muncul dalam kehidupan sehara-hari lebih menjurus pada pengklaiman “keakukan dan kekitaan”.

Orang yang berasal dari suatu kelompok etnis cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik. Kecenderungan ini disebut sebagai etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk memandang norma dan nilai yang dianut seseorang sebagai hal yang mutlak dan digunakan sebagai standar untuk menilai dan mengukur budaya lain.

Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap menurut Azwar (2000: 40) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Sedangkan menurut Gurungan (1991: 32) faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap ini adalah faktor internal dan eksternal individu.

a. Faktor-faktor Internal

Pengamatan dalam komunikasi melibatkan proses pilihan di antara seluruh rangsangan objektif yang ada di luar diri individu. Pilihan tersebut berkaitan erat dengan motif-motif yang ada dalam diri individu. Selektivitas pengamatan berlangsung karena individu tidak dapat mengamati semua stimulus yang ada.

b. Faktor-faktor eksternal

Sikap dapat dibentuk dan diubah berdasarkan dua hal, yaitu karena interaksi kelompok dan komunikasi Gerungan juga menambahkan apabila sikap sudah terbentuk dalam diri manusia, maka hal tersebut menentukan pola tingkah lakunya terhadap objek-objek sikap. Pembentukan sikap ini tidak terjadi dengan sendirinya, namun berlangsung dalam interaksi manusia, yaitu interaksi di dalam kelompok dan di luar kelompok. Pengaruh dari luar kelompok ini belum cukup untuk merubah sikap sehingga membentuk sikap baru.

Dalam narasi politik Indonesia pasa reformasi 1998 terlihat secara jelas bagaimana politik etnis sebagai embrio atau dinamika tersendiri dalam perhelatan politik lokal. Seiring dengan dinamika fragmentasi masyarakat lokal kedalam berbagai macam sub sistem sosial membuat etnisitas sebagai suatu kekuatan politik dalam mendorong percaturan politik, baik Pemilu Presiden, DPR dan DPRD maupun Pemilihan Kepala Daerah.

2. Identitas Etnis dan Relasi Etnis

Identitas seseorang sangat mempengaruhi persepsi diri individu, sebagai akibatnya individu menjadikan identitas etnis sebagai sandaran dalam evaluasi diri. Kekuatan dan kelemahan diri umumnya ditentukan oleh status seseoang dalam kelompok acuannya, dan bagaiman menilai orang lain yang di luar kelompoknya. Ketika simbol-simbol keetnisan

membentuk perasaan yang sangat kuat dalam diri individu, maka preferensinya kepada kelompok etnisnya menjadi sangat kuat.

Hubungan individu-individu yang bersangkutan dengan individu lain di luar kelompok etnisnya menjadi terganggu karena umumnya individu yang bersangkutan menolak penilaian dari individu etnis lain. Selanjutnya bersama-sama dengan individu lain dari suatu kelompok, mereka membuat kriteria yang dapat digunakan untuk melawan dan menolak penapat kelompok luar yang dominan Tajfel, (1981); Yagcioglu, (2004) dalam (Zakso, dkk 2004).

Relasi antar individu dengan individu lainnya senantiasa dimaknai sebagai tindakan individu yang memiliki interest mengakumulasi kesejahteraan (Mansyuri dan Hidayat dalam sjaf, 2012: 17). Namun menurut Sjaf (2012: 34) mengungkapkan hal yang berbeda dari fakta yang dikemukakan sebelumnya. Fenomena politik etnis di era desentralisasi melalui pilihan sistem demokrasi liberal (bukan demokrasi pancasila) menunjukkan tindakan aktor atau individu tidak berorientasi ekonomi.

Melainkan tindakan aktor atau individu senantiasa *embedded* dengan struktur obyektifnya sebagai sesuatu yang ada dan nyata. Dengan kata lain, Sjaf (2012: 36) beranggapan perspektif agen-struktur mampu

menjelaskan setiap tindakan aktor dipengaruhi pengalaman maupun struktur yang membentuk aktor atau dikenal dengan istilah *habitus*.

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertiana Pemilihan Umum

Banyak para ahli menjelaskan tentang Pemilu, antara lain di kemukakan oleh Arifin Rahmad (2002: 194), mengatakan bahwa pada hakekatnya Pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat guna menjalakan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai system Pemilihan Umum. Sedangkan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kasatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabuaten atau Kota disebutkan pemilihan umum legislatif. Pemilihan Umum legislatif merupakan sarana prasarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam sebuah peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pada demokrasi perwakilan, rakyat memegang kedaulatan penuh namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat oleh lembaga legislativ atau parlemen.

2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari daerah mereka. Mampu memimpin dan membawa daerah mereka menjadi lebih baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Pemilihan Kepala Daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing.

Menurut Cangara (2011: 210) dalam Pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dilakukan pemilihan langsung.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagaimana Pemilihan Kepala Daerah menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden,

dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.

Menurut pendapat Amirudin (2003: 183), Pemilihan Kepala Daerah yaitu:

> "Kesempatan bagi masyarakat didaerah untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki"

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

> "Pemilihan Kepala Daerah yang selanjudnya di sebut Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedudukan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1994 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Wakikota dan Wakil Walikota untuk Kota"

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada Pemilihan Kepala Daerah hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam

menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah ini.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam Pemilihan Umum untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan.

3. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

a. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara,
b. Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau

telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian),

c. Bebas yaitu setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya,
d. Rahasia yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan,
e. Jujur yaitu dalam penyelenggaraan Pemilu setiap penyelenggara atau pelaksana Pemilu, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku,
f. Adil yaitu berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan parpol perserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah meliputi sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah bila dilihat dari pasal 5 ayat 2 meliputi sebagai berikut:

   1) Perencanaan program dan anggaran,
   2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan,
   3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan,
   4) Pembentukan PPK, PPS,dan KKPS,
   2) Pembentukan Panwas Kabupaten atau Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS,
   3) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
   4) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

b. Adapun tahap penyelenggaraan sebagai mana di maksud pada ayat 1 me liputi:

   1) Pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati dn Calon Walikota,
   2) Uji Publik:

3) Pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota,
4) Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota,
5) Penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota,
6) Penetapan calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota,
7) Pelaksanaan kampenya,
8) Pelaksanaan pemungutan suara,
9) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Penetapan calon terpilih,
10) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilihan, dan
11) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

D. Kerangka Pikir

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Dalam perkembanganya Partisipasi politik selalu mengalami pasang surut, hal ini juga terjadi pada partisipasi etnis Tionghoa.

Partisipasi politik etnis Tionghoa dapat dilihat dari dua aspek yaitu bentuk partisipasi politik dan intensitas partisipasi politik. Menurut Almond dalam Mas’oed dan MacAndrews (1981) Partisipasi politik dibedakan dalam dua

bentuk yaitu Pertama, bentuk partisipasi politik Konvensional yaitu pemberian suara (*Voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan penjabat politik dan administratif. Sedangkan bentuk kedua partisipasi politik non konvensional yaitu bentuk partisipasi seperti mengajukan petisi demonstrasi, konvrontasi, mogok, tindakan kekerasan harta benda, tindakan kekerasan terhadap manusia dan perang geriliya dan refolusi.

Sedangkan bila dilihat dari aspek intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa menurut Roth Dan Wilson terbagai menjadi 4 yaitu :

1. Aktivis seperti pejabat partai politik, pimpinan parpol dan LSM,
2. Partisipan seperti petugas kampanye, anggota aktif partai politik, LSM dan proyek-proyek social,
3. Pengamat seperti menghadiri rapat umum partai mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam Pemilu. Seluruh informasi yang dibutuhkan dan berkenaan dengan penelitian ini didapat melalui wawancara langsung dan mendalam dengan informan yang telah ditentukan,
4. Orang apolitis, yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.

Berdasarkan realita yang ada peneliti tertarik untuk mencoba mengungkap Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Bandar Lampung tahun 2015. Bagaimana partisipasi yang dilakukan etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

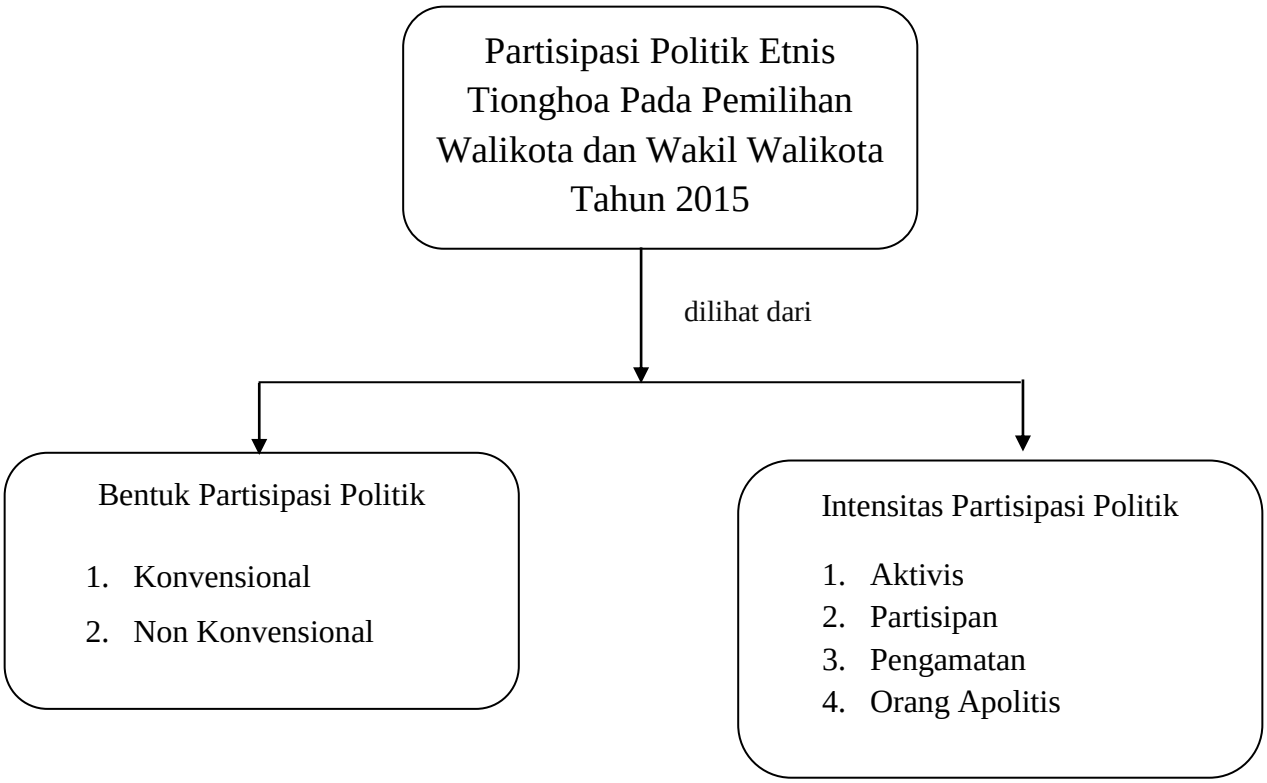

Gambar 2

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan daalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat di pertanggung jawabkan kebenaranya. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakuakan secara metodelogis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode tertentu, sistematis artinya berdasar suatu sistem, dan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisa data kuantitatif. Penggunaan penelitian deskriptif ini karena peneliti ingin melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena partisipasi politik etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Tahun 2015.

Jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian karna diangap mampu untuk mencari tahu bagaimana bentuk dan partisipasi masyarakat yang berkenaan dengan suatu objek yakni sekelompok orang dalam hal ini

partisipasi etnis Tionghoa. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian deskriptif menurut Suryabrata (2012: 75), tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjabaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian untuk merumuskan sebuah gambaran yang tersusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kejadian faktual.

Sedangkan analis data kuantitatif dalam penelitian ini digunakan agar penarikan kesimpulan dapat merefrsentasikan populasi dari suatu objek penelitian dalam hal ini adalah masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur. Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat data hasil kuesioner yang telah diberikan kepada responden penelitian kemudian digunakan sebagai bahan untuk menarik kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian partisipasi politik etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung Tahun 2015. Penggunaan tipe penelitian deskriptif dengan analisa kuantitatif ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan suatu fenomena sosial terkait partisipasi politik etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* adalah lokasi penelitian di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan di ambil berdasarkan tujuan penelitian, (Singarimbun, 2000: 169). Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 285) cara terbaik yang perlu di tempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Alasan peneliti memilih Kota Bandar Lampung dikarenakan Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam dan Pemilihan Kepala Daerah bukanlah yang baru dilakukan di Kota Bandar Lampung. peneliti juga beralasan memilih lokasi penelitian di Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung karena Kecamatan Teluk Betung Timur berdasarkan sejarahnya merupakan daerah perdagangan dan dihuni oleh etnis Toinghoa. Samapai sekarang mayoritas etnis Tionghoa tinggal dan menetap di Kecamatan Teluk Betung Timur.

C. Definisi Konseptual

Menurut Sugiyono (2012: 35), konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasi hal khusus. Definisi konseptual menggambarkan batasan-batasan masalah terhadap variabel yang dijadikan pedoman penelitian sehingga arah dan tujuan tidak menyimpang. Tujuan konsep adalah untuk menyederhanakan pemikiran dengan jalan menggabungkan sejumlah peristiwa di bawah suatu judul umum.

Sarwono (2006: 68), definisi konseptual adalah konsep yang didefinisikan dengan referensi konsep yang lain. Definisi konseptual bermanfaat untuk membuat logika proses perumusan hipotesis. Sedangkan Kerlinger (Silalahi, 2012: 118) mendefinisikan suatu konstruk dengan menggunakan konstruk-konstruk yang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konsep adalah sebuah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasi hal khusus, dan dapat ditemukan di kamus *(dictionary definition).*

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah partisipasi politik. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* (1994: 4) yaitu:

> "Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. *(By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take)"*

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist professional* yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

D. Definisi Operasional

Pasalong (2013: 86), juga menyebutkan bahwa definisi operasional adalah suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional digunakan untuk mengukur, menghitung, atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa definisi

operasional adalah penentuan suatu *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dan diamati.

Purwanto dan Dyah (2011: 18), definisi operasional adalah sebuah jembatan yang menghubungkan *conceptual-theoretical level* dengan *empirical-observational level.* Definisi operasional dimaksudkan untuk memberi rujukan-rujukan empiris apa saja yang terdapat dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur.

Sarwono (2006: 67), definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konstruk dengan kalimat yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati, diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Apabila peneliti melakukan observasi terhadap gejala atau obyek, maka peneliti mengindentifikasi apa yang telah didefinisikan. Di bawah ini adalah uraian mengenai definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Operasionalisasi Variabel Penelitian**

   Pada variabel penelitian partisipasi politik memiliki beberapa konsep yaitu. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh

mereka. Dimana di dalam konsep partisipasi politik ini memiliki beberapa indikator penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Betuk partisipasi

1. Konvensional

   a) Pemberian suara

   b) Diskusi politik

   c) Kegiatan kampanye

   d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

   e) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

   Pada bentuk partisipasi politik konvensional memiliki delapan pertanyaan.

2. Non-Konvensional

   a) Pengajuan Petisi

   b) Konfrontasi

   c) Mogok

   Pada bentuk partisipasi politik non-konvensional indikator pengajuan petisi tidak digunakan karena pada masyarakat etnis Tionghoa tidak ada pengajuan petisi. Serta pada bentuk partisipasi politik non-konvensional memiliki dua pertanyaan.

3. Intensitas Partisipasi

   a) Aktifis seperti pejabat partai politik, pimpinan parpol dan LSM

   b) Partisipan seperti petugas kampanye, anggota aktif partai politik, LSM dan proyek-proyek sosial.

   c) Pengamat seperti menghadiri rapat umum partai mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam Pemilu. Seluruh informasi yang dibutuhkan dan berkenaan dengan penelitian ini didapat melalui wawancara langsung dan mendalam dengan informan yang telah ditentukan.

   d) orang apolitis, yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.

Pada intensitas partisipasi tingkatan piramida ke empat yaitu orang apolitis tidak diteliti pada intensitas partisipasi politik karena masyrakata etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur tidak ada yang apolitis. Serta intensitas partisipasi politik memiliki tiga pertanyaan.

E. Populasi dan Sempel

5. Populasi

Zainudin dan Masyhuri (2011: 157), populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, nilai, peristiwa dan lainnya.

Arikunto (2013: 173), menjelaskan bahwa:

> "Populasi adalah keseluruan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus."

Menurut Sugiyono (2003: 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Teluk Betung Timur diketahui populasi etnis Tionghoa ada kurang lebih sebesar 1290 terbagi ke dalam 6 kelurahan yaitu Kelurahan Kota Karang Raya 140 jiwa, Kelurahan Kota Karang 300 jiwa, Kelurahan Suka Maju 80 jiwa, Kelurahan Perwata 550 jiwa, Kelurahan Keteguhan 160 jiwa, dan Kelurahan Way Tataan 60 jiwa.

6. **Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 91) teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2010: 91) *sampling* (sampel) didefinisikan sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi sehingga dihasilkan sampel yang mewakili populasi dimaksud. Besarnya sampel akan diambil dari jumlah populasi dengan rumus yang akan diajukan oleh Slovin (1960 dalam Sevilla,1994), yaitu:

$$\boxed{n = \frac{N}{N\,(d)^2 + 1}}$$

Dimana :

n = sampel

N = Populasi

d = Derajat Kebebasan 0,1

Jumlah keseluruhan populasi di atas apabila dimasukkan kedalam rumus akan menghasilkan jumlah sampel keseluruhan dari penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{1.290}{1.290\ (0,1)^2 + 1}$$
$$= 93$$

Berdasarkan perhitungan rumus di atas, dapat diketahui bahwa sampel dalam penelitian ini berjumlah 93.

F. Teknik Pengambilan Sempel

Sampel dari penelitian ini adalah bagian dari etnis Tionghoa yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur yang telah memiliki hak suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 16 januari 2016, diketahui bahwa etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur berjumlah sekitar 1,290 orang dapat dipastikan dengan jelas dimana sudah dilakukan penghitungan sampel maka sampel dari penelitian ini berjumlah sekitar 93 orang.

Setelah peneliti mengetahui jumlah populasi dan jumlah populasi sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini selanjutnya peneliti menetukan jumlah distribusi sampel yang akan di distribusikan ke 6 Kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Timur sebagai berikut:

$$N = \frac{a}{b} X 93$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi Sampel Etnis Tionghoa Perkelurahan

a = Jumlah Populasi Etnis Tionghoa Perkelurahan

b = Jumlah Etnis Tionghoa Di Kelurahan Teluk Betung Timur

93 = Jumlah Populasi Sampel Yang Dibutuhkan

Tabel 2. Jumlah populasi perkelurahan

Kelurahan	**Jumlah Populasi Etnis Tionghoa Perkelurahan**	**Jumlah Etnis Tionghoa di Kelurahan Teluk Betung Timur**	**Sampel**
Kota Karang Raya	140	1290	(140/1290)x93=9
Kota Karang	300	1290	(300/1290)x93=22
Suka Maju	80	1290	(80/1290)x93=6
Perwata	550	1290	(550/1290)x93=40
Keteguhan	160	1290	(160/1290)x93=11
Way Tataan	60	1290	(60/1290)x93=5
Total Sampel			**93**

(Sumber : Dioleh Oleh Peneliti)

Langkah terakhir adalah menentuakan sampel berdasarkan teknik *snowball* sampling dari jumlah 93 sampel yang telah didapat tersebut. Peneliti menggunakan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Purposive sampling,* yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, selainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada pertimbangan tertentu (Arikunto, 2006). Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Teluk Betumg Timur masyarakat etnis Tionghoa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

G. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Data Primer

Data primer menurut Husein Umur (2014: 42) adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorang seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data-data yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah sumber dari jawaban informan terhadap pertanyaan yang di ajukan dalam wawancara dan kuesioner. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan kepada informasi yaitu Masyarakat etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap Pemilihan Kapala Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Husein Umar (2014: 42) adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder data yang kita butuhkan. Adapun data-data sekunder yang berasal dari artikel-artikel yang dipublikasikan di internet serta berbagai literatur yang mendukung permaslahan seperti buku-buku dan undang-undang tentang Pemilu. Selain itu data sekunder juga didapatkan dari data monografi dan profil daerah yang berkaitan dengan penelitian, dokumen-dokumen KPU yang berkaitan

dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian Partisipasi Politik etnis Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah Pringsewu sebagai referensi. Data sekunder ini merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari data primer.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Angket atau Kuesioner

Angket atau yang sering disebut dengan metode kuesioner yang merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan cara menyebar daftar pertanyaan kepada responden. Siregar (2013: 21), kuesioner adalah teknik pengumpulan data informasi yang memungkinkan analisis memelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

2. Wawancara

Di dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan untuk menambah informasi dari kuisioner. Menurut Moleong (2014: 135) wawancara adalah suatu percakapan yang memiliki maksud-maksud tertentu. Percakapan ini

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Pengguanan metode wawancara dalam penelitian ini ditunjukan untu mengungkap data tentang Partisipasi Politik Etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu yang berbentuk instrument yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang diajukan secara langsung kepada informa yaitu masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Kota Bandar Lampung tahun 2015.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (1989: 236) dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat di pertangguang jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan data monografi dan profil daerah Kecamatan, dokumen KPUD terkait Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, buku literatur, skripsi, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penggunaan metode dokumentasi ditunjukan untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil

wawancara, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap menyeluruh dan memuaskan.

I. Skala Pengukuran

Skala dapat mengurutkan responden-responden ke dalam urutan ordinal dengan lebih tepat karena dalam proses tersebut diperhatikan intensitas bobot dari tiap pertanyaan (Singarimbun, 2008: 113). Dalam kuesioner setiap pertanyaan akan diberi 4 (empat) alternatif jawaban yaitu a, b, c, dan d dengan skor masing- masing.

Kuesioner dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan skor jawaban sebagai berikut:

1. Jawaban a, setiap jawaban mendapat skor 4,
2. Jawaban b, setiap jawaban mendapat skor 3,
3. Jawaban c, setiap jawaban mendapat skor 2,
4. Jawaban d , setiap jawaban mendapat skor 1.

J. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data merupakan teknik oprasional setelah data terkumpul. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi tersebut kemudian dioleh dengan cara:

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penelitian selesai menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadang belum memenuhi harapan peneliti, Sangadja (2010: 200). Proses *editing* dimulai dengan memberikan identitas pada instrument peneliti yang telah terjawab. Kemudian, memeriksa satu persatu lembar informasi pengolahan data, lalu memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia.

2. Pengkodean

a. Setelah selesai tahap *editing* dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. Pengkodean frekuensi digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot atau arti frekuensi tertentu. Sedangkan pengkodean lambang

digunakan pada poin yang tidak memiliki bobot tertentu. Pengkodean diberikan pada masing-masing hasil ukur yaitu:

a. Kode1: sangat tinggi (skor 3,26-4.00),

b. Kode 2: tinggi (skor 3.25 – 2.51),

c. Kode 3: rendah (skor 2.20-1.76),

d. Kode 4 sangat rendah (skor 1.00-1.75).

3. Tabulasi (Proses pembeberan)

Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data, maksud tabulasi adalah memasukkan data-data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitumg hasil data penelitian. Ada dua jenis tabel yang biasa dalam penelitian sosial, yaitu tabel data dan tabel kerja. Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data. Sedangkan tabel kerja adalah tabel yang dipakai untuk menganalisis data yang tertuang dalam tabel data.

4. Interprestasi Data

Interprestasi data merupakan data yang telah dideskripsikan baik melalui narasi yang diinterprestasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

K. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Pasalong (2013: 189), analisis deskriptif adalah analisis yang banyak digunakan untuk menguji satu variabel atau variabel mandiri. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukan data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat presentase sebagai uraian mengenai hasil akhir penelitian. Serta analisa deskriptif hasil wawancara terbuka.

Tabel tunggal dipergunakan untuk menggambarkan jawaban responden terhadap Partisipasi Politik Etnis Tionghoa Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data menggunakan perhitungan rumus interval. Analisis data dengan menggunakan analisis kuantitatif kemudian dijelaskan secara kuantitatif. Setelah diketahui interval kelas, selanjutnya dapat disusun kategori jawaban responden dari indikator-indikator sikap politik yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kategori sangat tinggi, yaitu 3,26 - 4.00
2. Untuk kategori tinggi, yaitu 2.51 - 3.25
3. Untuk kategori rendah, yaitu 1.76 - 2.50
4. Untuk kategori sangat rendah, yaitu 1.00 – 1.75

L. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas Data

Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen akan mengukur apa yang ingin diukur. Apakah benar, alat ukur kita itu dapat mengukur sifat objek yang kita teliti atau mengukur sifat yang lain. (Rachmad, 2006) Validitas yang dalam penelitian ini terletak pada ketepatan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan dalam kuesioner sebagai kunci utama (instrumen penting) dalam pengambilan data penelitian ini. Dalam hal ini validitas yang dipakai adalah validitas eksternal, dimana penulis mencoba untuk membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi dilapangan.

Hasil uji reliabilitasintrumen item-item penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Validitas Variabel Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional, Non-Konvensional dan Intensitas Partisipasi Politik

Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai Sig.	Keterangan
1	0,457	0,000	Valid
2	0,592	0,000	Valid
3	0,623	0,000	Valid
4	0,593	0.000	Valid
5	0,737	0,000	Valid
6	0,683	0,000	Valid
7	0,368	0,000	Valid
8	0,401	0,000	Valid
9	0,549	0,000	Valid
10	0,541	0,000	Valid
11	0,532	0,000	Valid
12	0,765	0,000	Valid
13	0,665	0,000	Valid
14	0,598	0,000	Valid

Sumber : lampiran 1 diolah tahun 2016

2. Uji Reliabilitas Data

Sebenarnya realibilitas dapat diartikan memilki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur memiliki realibilitas bila hasil pengukurannya relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh peneliti yang sama atau peneliti lainnya. Dalam penelitian ini instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner terbuka yang memuat pertanyaan penting untuk mengetahui data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selain itu cara lainnya adalah melalui wawancara (penggunaan sumber

primer), yaitu orang-orang yang menurut penulis penting untuk diambil datanya dalam penelitian ini.

Hasil uji reliabilitasintrumen item-item penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
Partisipasi Politik Konvensional	0,659	Reliabel
Partisipasi Politik Non-Konvensional	0,448	Cukup Reliabel
Intensitas Partisipasi Politik	0,503	Cukup Reliabel

Sumber : lampiran 2 diolah tahun 2016

IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur

1. Keadaan Umum

Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Pada awalnya Kelurahan Suka Maju masuk dalam Kecamatan Teluk Betung Barat. Pada tahun 2012 pemerintah memekarkan beberapa wilayah di Bandar Lampung sehingga Kelurahan Kota Karang, Kelurahan Kota Karang Raya, Kelurahan Perwata, Kelurahan Suka Maju, Kelurahan Keteguhan, Kelurahan Way Tataan saat ini termasuk kedalam Kecamatan Teluk Betung Timur.

Wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan,yaitu :

1. Kelurahan Kota Karang,
2. Kelurahan Kota Karang Raya,
3. Kelurahan Perwata,
4. Kelurahan Keteguhan,
5. Kelurahan Sukamaju,
6. Kelurahan Way Tataan.

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur berada di Kelurahan Suka Maju.

2. Letak Geografi dan Luas Kecamatan

Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki luas wilayah 1.252 ha, jumlah penduduk 40.278 jiwa, Jumlah Kapala Kaluarga 9.995 KK, Jumlah Kepala Lingkungan 14 LK, dan Jumlah Rukun Tentangga 99 RT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Teluk Betung Timur berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Teluk Betung Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Selatan,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat.

3. Topografi

Kecamatan Teluk Betung Timur terdiri atas wilayah perbukitan, dataran rendah dan pantai dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius.

4. Jumlah Penduduk Etnis Tionghoa

Berdasarkan jumlah 6 Kelurahan populasi masyarakat etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur sebagai berikut:

1. Kelurahan Kota Karang sekitar 300 jiwa,
2. Kelurahan Kota Karang Raya sekitar 140 jiwa,
3. Kelurahan Perwata sekitar 550 jiwa,
4. Kelurahan Keteguhan sekitar 160 jiwa,
5. Kelurahan Suka Maju sekitar 80 jiwa,
6. Kelurahan Way Tataan sekitar 60 jiwa.

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa masyarakat etnis Tionghoa yang lebih banyak pada Kelurahan Perwata sedangkan pada Kelurahan yang paling rendah masyarakat etnis Tionghoa di Kelurahan Way Tataan makan pada jumlah keseluruhan etnis Tionghoa di Kecamatan Teluk Betung Timur ada sekitar 1290 jiwa.

5. Persentase Tingkat Partisipasi

Kecamatan Teluk Betung Timur terdapat enam Kelurahan yang masyarakat berdomisili mayoritas masyarakat etnis Tionghoa, potret mengenai partisipasi politik Kecamatan Teluk Betung Timur tidak terlalu banyak, mengingat Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan Kecamatan yang baru saja melakukan pemekaran dari Kecamatan Teluk Betung Barat. Adapun persentase tingkat partisipasi dari enam Kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Tingkat partisipasi Kelurahan Kota Karang sebesar 75%,
b. Tingkat partisipasi Kelurahan Kota Karang Raya sebesar 76%,
c. Tingkat partisipasi Kelurahan Perwata sebesar 72%,
d. Tingkat partisipasi Kelurahan Keteguhan sebesar 75%,
e. Tingkat partisipasi Kelurahan Suka Maju sebesar 72%,
f. Tingkat partisipasi Kelurahan Way Tataan sebesar 82% .

Berdasarkan data di atas partisipasi pada pemilihan kepala daerah pada Teluk Betung Timur paling tinggi berada di Kelurahan Way Tataan dimana persentasenya 82% sedangkan Kelurahan paling rendah dalam partisipasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandara Lampung yakni pada Kelurahan Perwata hanya sebesar 72% dan Pada Kleurahan Suka Maju hanya sebesar 72%.

B. Sejarah Sosial dan Politik Komunitas Etnis Tionghoa

1. Masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung dan Identitas Ketionghoaan

Berdirinya Asosiasi Hakka Yayasan Metta Sarana di Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari sejarah masuknya orang Tionghoa ke Kota Bandar Lampung. Menurut catatan perjalanan orang Tionghoa pada abad ke-17, mereka sudah mengenal kerajaan Tulang Bawang dengan sebutan lainnya yakni *To Lang Pohwang* (= Dù Lǎng Bā Wàng). Kerajaan ini merupakan kerajaan terbesar di Lampung (Kebudayaan, 1997/1998).

Di tahun 1364 – 1643, daerah Lampung telah terkenal dengan hasil hutannya. Sehingga, di era 1600-an orang-orang Tionghoa perantauan telah mengincar daerah Lampung karena sektor perdagangan serta argoindustri yang sudah bisa dikembangkan. Pada penjajahan Belanda tepatnya zaman VOC golongan etnis Tionghoa dikelompok-

kelompokkan oleh pihak Belanda pada masa itu merasa mendapat saingan dan perlu untuk memecah etnis Tionghoa yang ada yang ada di kawasan Teluk Betung. Pihak Belanda meresa perlu untuk mengadu domba kalangan etnis Tionghoa perantau (*Huaqian*).

Kemudian pada di zaman ini juga Hindia Belanda 1668 VOC mendirikan benteng Petrus Albertus di Tulang Bawang. Benteng ini dijadikan sebagai tempat penampungan hasil-hasil pembelian lada di daerah Lampung bagian Utara. Selanjutnya, pada tahun 1738 VOC kembali menempatkan bentengnya yang bernama benteng "*Val Kenoog*" di Bumi Agung. Di tahun 1900-1928, sebagian besar roda perekonomian daerah Lampung sudah banyak dikuasai oleh orang Tionghoa.

Pada tahun 1905, jumlah orang Tionghoa perantauan yang sudah bermukim di Lampung berjumlah sekitar 486 jiwa, dengan jumlah orang puak Hakka 100 jiwa. Jumlah imigran dari China ini relatif lebih besar dari pada jumlah kedatangan orang-orang Arab yang hanya 108 jiwa atau orang-orang Eropa yang hanya berjumlah 146 jiwa (Kebudayaan, 1997/1998). Umumnya para Tionghoa ini bermukim di daerah-daerah kawasan tepi pantai dan kawasan perkebunan (Coppel, 2005). Daerah Lampung juga cukup strategis dengan adanya dermaga-dermaga sebagai pendukung jalur perdagangan. Pada tahun 1902, sudah terlihat keramaian serta kesibukan yang terjadi di Pelabuhan Teluk Betung dan Pelabuhan Menggala. Pelabuhan Teluk Betung dinilai sangat strategis

kerena dermaga tersebut merupakan satu-satunya pintu keluar masuk dari dan ke Batavia.

Pada tahun 1942, etnis Tionghoa melakukan perlawanan perang terhadap tentara Jepang ingin menguasai daerah Lampung. Bentrok senjata terjadi di Tulung Buyut Lampung Utara dimana pasukan Jepang masuk ke Lampung memalui Pelembang. Dimana pada saat itu kelompok etnis Tionghoa masih menjadi sasaran penindasan, dan banyak masyarakat etnis Tionghoa dipekerjakan sebagai romusha untuk pembanguanan lapangan terbang beranti, lapangan terbang di Menggalo dan pelabuhan di Way Tuba (perbatasan Kota Bumi dan Martapura). Dalam perkembanagan etnis Tionghoa di Bandar Lampung mendapat perlakuan yang tidak jauh berbeda dari etnis Tionghoa lainnya di Nusantara dimana masih adanya tindakan kekerasan dan diskriminatif dirasan oleh etnis Tionghoa di Bandar Lampung.

Pemerintah daerah setempat memberikan batasan-batasan etnis Tionghoa yang mendirikan organisasi-organisasi sosial. Batasan-batasan yang diterapkan oleh penguasa setempat antara lain adalah melarang kegiatan upacara keagaman, budaya etnis Tionghoa diberi ruang yang sangat kecil sehingga hampir tidak ada ruang gerak untuk mengembangkan budaya Tionghoa sendiri. Beberapa gedung yang sempat berdiri untuk kegiatan sosial juga di ganti menjadi gedung pemerintahan. Etnis Tionghoa juga dibatasi dalam bidang politik dimana

hanya diberikan kebebasan atau ruang untuk melakuakn kegiatan di bidang perekonomian. Hingga saat ini etnis Tionghoa memiliki keengganan untuk berpartisispasi dalam bidang politik. Etnis Tionghoa merasa cukup berpartisipasi dalam biadang perekonomian saja khususnya dalam bidang perdagangan.

Dalam perkembangannya, di era yang sama semakin bertambah lagi dengan adanya dermaga-dermaga kecil lain yang dibangun di Kota Agung, Krui dan Labuhan Maringgai. Dinamika perdagangan komoditi hasil hutan ini semakin banyak ketika pembukaan Pelabuhan Panjang di sekitar tahun 1935 (Kebudayaan, 1997/1998). Selain urutan mengenai sejarah masuknya orang Tionghoa ke Kota Bandar Lampung, pembahasan mengenai masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung juga tidak dapat terlepas dari penjelasan para peneliti berkaitan dengan studi mengenai identitas Ketionghoan yang ada di Indonesia. Menurut Ang, identitas Ketionghoaan yang ada tidak lagi bersifat murni dan identitas Tionghoa ini tidak dapat dikategorikan secara tetap. Hal ini disebabkan karena identitas Tionghoa bersifat hibrid.

Adanya pengaruh asimilasi dan akulturasi menjadikan identitas Tionghoa mengandung unsur-unsur keberagaman, bersifat dinamis dan terbuka. Oleh karena itu, memungkinkan untuk dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Dengan kata lain, identitas Tionghoa tidak hanya dapat ditetapkan melalui satu bentuk ciri

yang berasal dari identitas Tionghoa itu sendiri seperti: ciri fisik, budaya, bahasa, geografi, dan lain-lain. Penjelasan mengenai apa itu identitas Tionghoa dapat dicontohkan seperti mereka yang merupakan bagian dari keturunan Tionghoa, namun sudah tidak dapat berbicara menggunakan bahasa Mandarin ataupun dialek Tionghoa lainnya.

Mereka memiliki ciri fisik orang Tionghoa namun tidak mengenal budaya Tionghoa dan lain sebagainya (Ang, 2001). Teori ini mendukung fakta di lapangan bahwa sekarang sudah terjadi perubahan-perubahan terkait identitas Ketionghoaan masyarakat Tionghoa di Kota Bandar Lampung. Kenyataannya masyarakat kesulitan untuk membedakan apakah seseorang itu memiliki bentuk ciri yang dapat dibedakan dengan tegas dan jelas bahwa mereka adalah murni seorang Tionghoa dengan etnis tertentu.

Pada masa Pasca-Orde Baru dan dengan adanya kebebasan yang luas, kehidupan etnis Tionghoa semakin mebaik. Ini dapat dilihat dari kehidupan ekonomi sosial dan politiknya. Partisipasi politik etnis Tionghoa mulai menunjukan geliatnya dimana pada pemilihan umum 2004 , dimana ada salah satu etnis Tionghoa masuk dalam struktur pemerintahan. Setelah pemerintahan Gus Dur, iklim politik bagi etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam politik lebih kondusif. Pada Pemilu 2004 dari publikasi media diakui selama Pemilu Legislatif, tercatat setidaknya lebih dari seratus calon legislatif etnis Tionghoa terbesar

dibeberapa partai politik. Tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil mendapat kursi DPR.

Bahkan dari partai politik yang bernuansa etnis Tionghoa, hanya seseorang yaitu Nurdin Purnomo dari partai Bhineka Tunggal Ika yang berhasil menduduki kursi DPR. Pada Pemilu 1999, etnis Tionghoa tanpak malu-malu dan agak canggung dalam berpolitik namun pada Pemilu 2004 dan 2009 partisipasi etnis Tioanghoa terlihat semakin dinamis dan aktif dalam berpartisipasi politik.

Di Provinsi Lampung sebenarnya tidak begitu tanpak, namun demikian sudah mulai menunjukan adanya partisipasi politiknya. Dimana pada saat pemilihan legislatif Provinsi Lampung Tahun 2004, ada salah satu warga keturunan etni Tionghoa yang bernama Effendi Taslim memberanikan diri untuk ikut serta berpartisipasi dan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD pada saat ini. Pada tahun selanjutnya tepatnya tahun 2009 warga keturunan etnis Tionghoa kembali terlihat dalam pencalonan anggota legislatif dengan nama Sudin dan Hartanto Loh Jaya yang sampai tahun 2014 duduk di kursi DPRD Provinsi.

Sedangakan pada tahun 2015 Pada pemilihan Walikota Bandar Lampung, sempat muncul mencalon diri sebagai Walikota Bandar

Lampung yaitu Hartato Loh Jaya. Hartato Lah Jaya pada saat itu sudah mempromosikan dirinya namun pencalonannya batal dimana tidak menjadi salah satu kandidat Walikota. Selain itu sudah bermunculan warga-warga Bandar Lampung khususnya menjadi kader-kader partai yang ada di Kota tersebut sehingga partisipasi etnis Tionghoa saat ini terbilang sudah mengalami kemajuan.

Pada saat itu organisasi sosial yang berdiri saat ini adalah Kepengurusan Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Organisasi ini sebuah wadah untuk menampung berbagai macam aspirasi masyarakat Tionghoa. Kepengurusan Paguyuban Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Lampung periode 2013-2017 dilantik langsung oleh Ketua Umum PMSTI Pusat David Herman Jaya di Gedung Hakka Matta Sarana, Suteng, Teluk Betung Bandar Lapung 20 Juni. Tionghoa yang ada di Bandar Lampumg. Ketua Panitia Gunawan Hendra mengatakan PSMTI merupakan organisasi sosial kemsyarakatan yang bersifat nasional dan non politik, telah memiliki cabang di seluruh Indonesia. Adapun PSMTI Lampung diharapaknan bisa menjadi wadah untuk makin mempererat silatuhrahmi antar etnis Tionghoa di Lampung.

Selain itu Ketua Umum PSMTI menyatakan bahwa berharap dengan adanya PSMTI Bandar Lampung dapat memajukan warga Tionghoa Indonesia, Supaya bisa rukun dan harus dapat bekerja sama dengan

Pemerintah Lampung. Dia menegaskan kini sudah tidak ada diskriminasi lagi terhadap warga Tionghoa dimana etnis Tionghoa bukan lagi minoritas, karena sudah banyak warga Tionghoa ikut berperan dalam bidang pembangunan, yang perlu di ingatkan bahwa PSMTI tidak memberikan sara, tetapi organisasi yang bergerak dalam kegiatan sosial. Sementara itu, Ketua Umum PSMTI Lampung Tarmizi Tanjung mengatakan PSMTI didirikan untuk satu tujuan yang menghimpun golongan Tionghoa dimana akan melakukan gerakan sosial yang berkerjasama dengan suku yang lain, membangun Lampung,

Kondisi ini juga terjadi di dalam keanggotaan Asosiasi Hakka Yayasan Metta Sarana. Keanggotaan yang ada tidak lagi dapat dikatakan mampu mempertahankan identitas sebagai asosiasi yang murni dengan mengutamakan hanya Puak Hakka yang menjadi anggotanya. Hal ini dikarenakan masih adanya usaha pelestarian kebudayaan dari bagian yang lebih kecil yakni keluarga.

Sebagai contoh adalah ketika seorang pria Puak Hakka yang menikah dengan seorang wanita yang berasal dari etnis Hokkian, secara tidak langsung sang wanita telah masuk menjadi seorang Puak Hakka, dan tidak lagi menyandang identitasnya sebagai etnis Hokkian melainkan telah diterima sebagai seorang Puak Hakka. Namun kondisi ini tentu tidak bisa dijelaskan dengan mudah karena secara latar belakang kebudayaan terlihat jelas perbedaan yang ada. Secara tidak langsung

perlu adanya proses panjang penyesuaian untuk dapat mengatasi perbedaan yang terjadi.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menjabarkan sejumlah simpulan sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi masyarakat etnis Tionghoa pada Pilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Timur adalah bentuk partisipasi politik konvensional, namun tidak di semua aspek partisipasi muncul pada aspek komunikasi individual dengan pejabat politik dengan mean yang dihasilkan 3,27 masuk dalam kategori sangat tinggi dan administratif dengan mean yang dihasilkan 3,40 masuk dalam kategori sangat tinggi. Bahwasanya komunikasi komunitas kepada pejabat politik dan administratif masuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk diakumulasi dari keseluruhan jawaban responden partisipasi politik konvensional mean yang dihasilkan 2,16 masuk dalam kategori rendah,

2. Bentuk partisipasi non-konvensional masyarakat etnis Tionghoa pada Pilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Timur adalah tidak masuk dalam bentuk partisipasi politik dimana akumulasi dari semua jawaban mean yang dihasilkan 1,36 masuk dalam kategori sangat rendah untuk tidak berminat melakukan mogok kerja, kertertarikan upaya pertentang dan pengajuan aspirasi.

3. Intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung tahun 2015 adalah masuk pada tingkat kategori pengamat dengan mean yang dihasilkan 2,74 masuk dalam kategori rendah. Sedangkan dari akumulasi keseluruhan jawaban mean yang dihasilkan sebesar 1,90 masuk dalam kategori rendah. Meraka mengikuti pemeberitaan perpolitikan daerah, namun sangat minim keikut sertaan atau terlibat pada pemilihan dan sebagai petusa kampanye, anggota aktif, partai politik, LSM dan proyek-proyek sosial.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara Pemilu, Terkait dengan kurang minatnya warga etnis Tionghoa dalam berpartisipasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Waikota Bandar Lampung tahun 2015 di Kecamatan Teluk Betung Timur dapat dikatakan cukup besar, perlu dilakukan sosialisasi bidang pendidikan pemilih kepada masyarakat seperti pemahaman untuk selalu tetap menyadari akan pentingnya keikutsertaan atau berpartisipasi dalam pemungutan suara, memberikan suara berdasarkan hati nurani, tanpa dipengaruhi oleh janji-janji para calon,

2. Masyarakat etnis Tionghoa harus meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan politik dan pemerintahannya yang diselenggarakan pada tingkat lokal maupun nasional,

3. Terkait dengan bentuk dan intensitasnya partisipasi politik, pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung yang akan berlangsung selanjutnya, diharapkan partisipasi warga etnis Tionghoa khususnya harus lebih aktif atau kata lainnya harus lebih banyak melibatkan diri secara langsung pada keseluruhan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan.

\

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku/Jurnal/Essay/Thesis/Paper

A.Almon, Gabriel dan Sidney Vebra.1984.*Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara).*Jakarta:PT Bina Aksara

Agus Purwanto, Erwan & Dyan Ratih Sulistystitu, 2017. *Metode Penelitian Kantitatif, Untuk Administrasi Publik & Masalah-masalah Sosial,* Gaya Media. Yogyakarta

Amirudin dan A. Zaini Basri. 2006. *Pilkada Langsung Problem dan Prospek.* .Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Andolina,Molly.2006.*Participant and Civil Society*.oxford University Press. New York.

Arifin, Anwar.2011.*Komunikasi Politik*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 1989. *Prosedur Penelitian: Syatu Pendekatan Praktik.* Jakarta :Bina Aksa

Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Syatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta

Azwas, S.1998. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*.Edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiarjo, Mariam.1983. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarat: Gramedia pustaka Utama

Budiarjo, Mariam.2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarat: Gramedia pustaka Utama

Czarniawska, Barbar.2004.*Narative in Social Science Research: A Sourcebook of New Methods.*California:SAGE Publication Inc

Green, Jessica, and Bradnee, 2007, *the politic of participation in Sustainable Develpoment Governance,* United Nations University Press, Tokyo

H. Hei, Norman.2002.*Partisipasi Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Pemelitian Kuantitatif & Kualitatif,* Yogyakarta. Graha Ilmu

Moleong, J. Lexy.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muhhtar. 2013.*Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif.* Jakarta: GP Press Group

Newton, Kenneth, & Van Deth, 2010, *Foundation of Camparative Politics: Democracie of the Modern Word,* Cambridge University press, United Kingdom

Pasalong, Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi.* Alfabeta: Bandung

Putman, D. Robert, 2002, *Democracies in Flix: The Evalution of social Capital in Contemporary Society,* Oxford University Press

Rahmad, Arifin. 2014. *Anekdot dan ironipemilu.*.Yogyakarta:PT Buku Seru

Rathod, P.B., 2010, *Elements of Development Administration (Theory and Practice),* ABD Publishers, India

Rosembrerg, W. Shawn, 2007*, Deliberation, Participation, and Democracy: Can the People Govern?,* Palgrave Macmillan, New York

Rush, Michael dan Phillip Althoff.2003.*Pengantar Sosiologi Politik* (terjemahan Dra.Kartini Kartono).Jakarata:PT. Raja Grafindo Persada

Sasroatmodjo, Sudijono.1995. *Perilaku Politik.* Semarang: IKIP Semarang Press

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 200o. *metode Penelitian Survey.* LP3ES. Jakarta

Singarumbun, Marsi, dan Sofian, Efendi, 2006. *Metode Penelitian Survey.*Jakarta:Cetakan Kedelapanbelas, Edisi Revisi, Penerbit PT Pustaka

Sugiono, 2012. *Metode PEnelitian Kuantitatoif, Kualitatif dan R & B,* Alfabeta Bandung

Suryabrat, Sumadi. 2010. *Metodelogi Penelitian Jakarta.* PT Raja Gratindo Persada

Sutami, 2009, *Pertisipasi Masyarakat Pada Pembagunan Prsarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Mesyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarat Utara, Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota,* Universitas Diponegoro, Samrang. Tidak Dipublikasikan.

Umar, Husein. 2014, *Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis*, Edisi ke2. Jakarta: Rajawali Press

Zainudin dan Masyahuri, 2011, *Metode Penelitian, Pendekatan Praktis & Aplikasi*, Bandung: PT Refika Aditam

Zamroni, 2013, *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multi Kulturar*, Penerbit Obak (anggota IKAPI). Yogyakarta

Dokumen

Undang-undang Rebublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Pemilihan Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Internet

http://wikipedia.org/data-statistik.phpdiakses pada 18 Februari 2015, 11.30 WIB

http:// data.kpu.go.id/dpt.php diakses pada 10 Februari 2014, 14.45 WIB

http://ysrodiyah.com/demokrasi-di-indonesia/

http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-pemilu-umum-tujuan-fungsi.html?m=1

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pemilihan-kepala-daerah.html

http://www.antarnews.co/berita/tujuh-gelombang-pilkada-serentak-2015-hingga-2027,diakses pada 23 april 2015, pukul 20.01 WIB

https://issuu.com/lampungpost/docs/lampungpost-edisi-9april-2013/17

http;//lampost.co/berita/pemkot-bandar-lampung-naikan-tarif-pbb-hing ga-300%